



Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kampung  
Kabupaten Way Kanan

# LKJIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2023

Jalan Camat Mas Enggung No.12  
Komplek Perkantoran PEMDA  
Blambangan Umpu

2024

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Harapan kami semoga LKj ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Blambangan Umpu, Januari 2024

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,



**IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751101 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1. Personil .....	5
2. Sarana dan Prasarana .....	5
3. Pembiayaan .....	6
1.4. Sistematisa Penyajian .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1. Rencana Strategis .....	8
a. Visi .....	8
b. Misi .....	8
c. Tujuan .....	9
d. Sasaran dan Indikator Sasaran .....	9
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	11
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	13
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	23
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Pengukuran Kinerja .....	26
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	27
3.3 Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan .....	29
3.4 Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV PENUTUP .....	36

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pembiayaan .....	6
Tabel 2.1. Tujuan Dinas PMK .....	9
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	10
Tabel 2.3. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM .....	11
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas PMK Tahun 2021-2026 .....	13
Tabel 2.5. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2023 .....	14
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Indikator Sasaran .....	27
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMK Tahun 2023 .....	28
Tabel 3.3. Capaian Meningkatnya Peran dan Lembaga Organisasi Masyarakat Kampung Tahun 2023 .....	29
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	30

Lampiran-Lampiran :

1. Tabel IKU SKPD Tahun 2021-2026.
2. Data IDM 2023.
3. Tabel Rencana Kerja / RKT SKPD Tahun 2023.
4. Tabel Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023.
5. Tabel Rencana Aksi SKPD Tahun 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKj tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

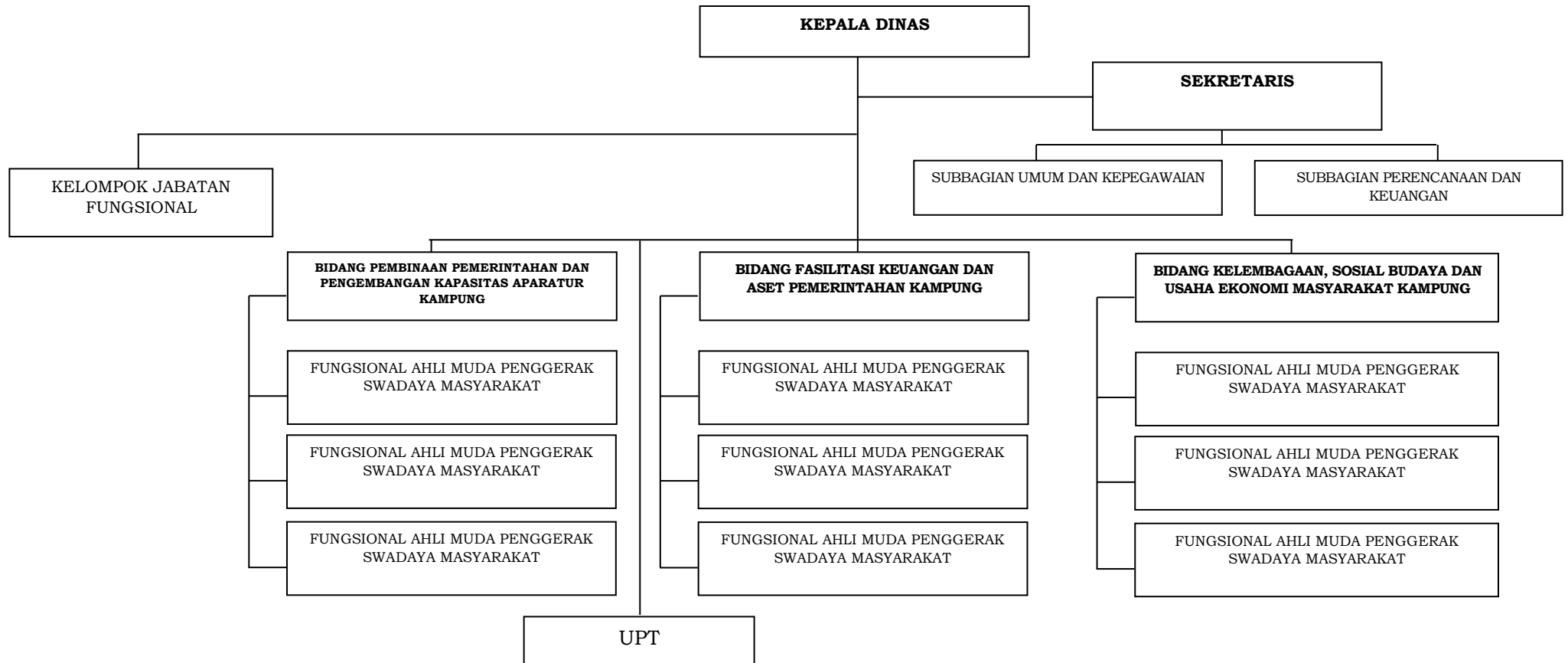
Tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKj ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

### 1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN**





## 1. Personil

Personil yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

### Sumber Daya Manusia / Personil:

NO	JABATAN	JML	PANGKAT/GOL/RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IVc)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
3	Kabid	3	Pembina (IV/a)	1	S2	2	
			Penata Tk. I (III/d)	2	S1	1	
4	Kasubbag	2	Penata (III/c)	2	S1	2	
5	JF. Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat	6	Pembina (IV/a)	1	S2	2	
			Penata Tk. I (III/d)	3	S1	3	
			Penata (III/c)	1	D3	1	
			Penata Muda Tk.1 (III/b)	1			
6	Staf	5	Penata (III/c)	2	S2	1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S1	3	
			Penata Muda (III/a)	1			
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	SLTA	1	
7	Honorar	15	-	-	S1	5	
			-	-	D3	1	
			-	-	SLTA	5	
			-	-	SMP	4	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>33</b>		<b>33</b>		<b>33</b>	

Jumlah keseluruhan PNS dan tenaga honorar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah 33 orang.

## 2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Randis Roda 4 (empat)	3	
2	Randis Roda 2 (dua)	6	
3	Mesin Tik Elektrik	2	
4	Calculator	1	
5	Filling Kabinet	8	
6	Almari Besi	10	
7	Brankas	1	
8	Whiteboard	2	
9	Almari Kayu	3	
10	Kursi Kerja ½ Biro	14	
11	Kursi Kerja 1 Biro	6	
12	Kursi Rapat	130	
13	Meja Kerja	20	
14	Kursi Tamu	3	
15	Meja Rapat	6	
16	Telepon	1	
17	Komputer	2	
18	Laptop	13	
19	Printer	10	
20	Proyektor / LCD	2	
21	AC	11	
22	Soundsystem	1	
23	Dispenser	4	
24	Kamera	1	
25	Kulkas	2	
26	TV	1	
27	Kaca Cermin	2	
28	Papan Pengumuman	1	

### 3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel. I

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rp. 6.796.834.585,-</b>	
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b> Belanja Pegawai	<b>Rp. 2.015.561.700,-</b> <u>Rp. 2.015.561.700,-</u>	
2.	<b>Belanja Langsung</b> a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	<b>Rp. 4.781.272.885,-</b> Rp. 4.754.111.885,- Rp. 27.161.000,-	

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2023

#### 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kerangka Pengukuran Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama;
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada);
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. RENSTRA STRATEGIS**

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan:

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***"Way Kanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026"***.

b. Misi Ke-1 dan Misi Ke-3:

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera 2021-2026. Terkait yang menjadi tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengemban Misi kesatu dan Misi ketiga yaitu: Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Misi 3.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

- c. Tujuan: **1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.** Dengan indikator: "1.Nilai Evaluasi Sakip. 2. Indeks Desa Membangun.
- d. Sasaran: **1.Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD, 2. Meningkatkan Kualitas Kampung, Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Meningkatnya Ketahanan Sosial, Meningkatnya Ketahanan Lingkungan.** Dengan indikator: 1.Nilai Sakip OPD. 2. Indeks Kategori Kampung, Nilai IKE, Nilai IKS, dan Nilai IKL.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagai berikut:

#### 2.1.1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **"1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.**

Tabel 2.1  
Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun

#### 2.1.2. SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 2.2

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE
		Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS
		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL

Indikator yang digunakan adalah indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang

jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal.

Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun di rilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menetapkan menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu:

Tabel. 2.3  
Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	SANGAT TERTINGGAL	$\leq 0,491$
2.	TERTINGGAL	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	BERKEMBANG	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4.	MAJU	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	MANDIRI	$> 0,815$

Pada tahun 2023, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Way Kanan mengalami kenaikan Status Desa yaitu Desa Mandiri berjumlah 26, Desa Maju berjumlah 97, dan Desa Berkembang berjumlah 98. Sebagaimana data IDM Kabupaten Way Kanan terlampir.

## 2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sejalan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Strategi yang akan digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yaitu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sistem nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga serta aspek terkait lainnya;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan, difokuskan pada peningkatan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas:

(1) Kebijakan Internal:

- Mengadakan pelatihan bagi aparatur kampung/kelurahan untuk menambah keahlian dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan, peraturan-peraturan, administrasi, pengelolaan keuangan dan sebagainya;
- Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat;
- Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- Mencari dukungan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat untuk mendukung dalam pengelolaan pelaksanaan program-program pembangunan.



(2) Kebijakan Eksternal:

- Menampung aspirasi masyarakat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
- Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memberikan kepercayaan yang banyak kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri;
- Menyiapkan masyarakat dibidang pengetahuan, keterampilan dan pendampingan;
- Membuka dialog dengan masyarakat;
- Membuka jalur informasi masyarakat;
- Memberi bantuan modal sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan manajemen;
- Penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  
Tahun 2021-2026

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)
2	Meningkatkan Kualitas Kampung	1. Indeks Kategori Kampung 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Lingkungan 4. Indeks Ketahanan Sosial	Rilis Kemendesa Sesuai Rumus IDM bagian IKE Sesuai Rumus IDM bagian IKL

			Sesuai rumus IDM bagian IKS
--	--	--	-----------------------------

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026 telah dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor: 050/257/IV.13-WK/2022 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026. IKU tersebut disajikan pada Lampiran 1.

Pada Tahun 2023 dari jumlah seluruh kampung di Wilayah Kabupaten Way Kanan sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) kampung, ditargetkan jumlah kampung yang tertinggal dan kampung berkembang berkurang dan menjadi kampung maju serta mandiri. Dari hasil penilaian Indeks Desa Membangun, kampung dengan status “mandiri” sebanyak 26 (dua puluh enam) kampung, dan kampung dengan status “maju” sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kampung, kampung dengan status “berkembang” sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) kampung. Untuk kampung tertinggal, dan sangat tertinggal sudah tidak ada lagi atau 0 (nol).

Dari data tersebut jumlah seluruh kampung sangat tertinggal/tertinggal dari tahun ke tahun semakin berkurang atau 0 (nol), sementara jumlah kampung berkembang, maju, dan mandiri dari tahun ke tahun semakin bertambah/meningkat jumlahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Tahun 2023 adalah BAIK.

Hasil Indeks Desa Membangun Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.5  
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)  
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
1	GUNUNG LABUHAN	GUNUNG LABUHAN	0.9233	MANDIRI
2	WAY TUBA	GUNUNG LABUHAN	0.8378	MANDIRI
3	PISANG BARU	BUMI AGUNG	0.8771	MANDIRI
4	TANJUNG REJO	NEGERI AGUNG	0.8578	MANDIRI

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
5	KALI PAPAN	NEGERI AGUNG	0.8254	MANDIRI
6	REJO SARI	NEGERI AGUNG	0.8186	MANDIRI
7	GUNUNG KATUN	BARADATU	0.8916	MANDIRI
8	BHAKTI NEGARA	BARADATU	0.8992	MANDIRI
9	SERUPA INDAH	PAKUAN RATU	0.8394	MANDIRI
10	PAKUAN RATU	PAKUAN RATU	0.8437	MANDIRI
11	SUKA BUMI	PAKUAN RATU	0.8248	MANDIRI
12	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	0.8860	MANDIRI
13	KALIAWI INDAH	NEGERI BESAR	0.8311	MANDIRI
14	SETIA NEGARA	BARADATU	0.8565	MANDIRI
15	MEKAR ASRI	BARADATU	0.8249	MANDIRI
16	BUMI BARU	BLAMBANGAN UMPU	0.8824	MANDIRI
17	LEBAK PENIANGAN	REBANG TANGKAS	0.8190	MANDIRI
18	GUNUNG SARI	REBANG TANGKAS	0.8178	MANDIRI
19	TANJUNG RAYA	REBANG TANGKAS	0.8186	MANDIRI
20	UMPU BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0,8360	MANDIRI
21	KOTA WAY	KASUI	0.8184	MANDIRI
22	JAYA TINGGI	KASUI	0.8373	MANDIRI
23	SERDANG KURING	BAHUGA	0.8468	MANDIRI
24	WAY TUBA	WAY TUBA	0.8824	MANDIRI
25	BUMI RATU	UMPU SEMENGIK	0.8662	MANDIRI
26	NEGERI BARU	UMPU SEMENGIK	0.8252	MANDIRI
27	SIDOARJO	UMPU SEMENGIK	0.7649	MAJU
28	GUNUNG SANGKARAN	BLAMBANGAN UMPU	0.7778	MAJU
29	SEGARA MIDER	BLAMBANGAN UMPU	0.7297	MAJU

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	IDM	STATUS
30	SANGKARAN BHAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.726	MAJU
31	SRI REJEKI	BLAMBANGAN UMPU	0.7202	MAJU
32	TULANG BAWANG	BAHUGA	0.8021	MAJU
33	SAPTO RENGGO	BAHUGA	0.8005	MAJU
34	BUMI AGUNG WATES	BAHUGA	0.7487	MAJU
35	PAKUAN BARU	PAKUAN RATU	0.8011	MAJU
36	PAKUAN SAKTI	PAKUAN RATU	0.7319	MAJU
37	RUMBIH	PAKUAN RATU	0.7741	MAJU
38	NEGARA RATU	PAKUAN RATU	0.7684	MAJU
39	NEGARA SAKTI	PAKUAN RATU	0.7402	MAJU
40	TANJUNG AGUNG	PAKUAN RATU	0.7356	MAJU
41	TANJUNG SERUPA	PAKUAN RATU	0.7905	MAJU

42	NEGARA HARJA	PAKUAN RATU	0.7816	MAJU
43	NEGARA TAMA	PAKUAN RATU	0.7519	MAJU
44	BAKTI NEGARA	PAKUAN RATU	0.7094	MAJU
45	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	0.7303	MAJU
46	SUMBER REJEKI	NEGERI AGUNG	0.8011	MAJU
47	BANDAR DALAM	NEGERI AGUNG	0.8102	MAJU
48	MULYA SARI	NEGERI AGUNG	0.7254	MAJU
49	PULAU BATU	NEGERI AGUNG	0.7602	MAJU
50	GEDUNG JAYA	NEGERI AGUNG	0.8011	MAJU
51	KARYA JAYA	WAY TUBA	0,7092	MAJU
52	WAY TUBA ASRI	WAY TUBA	0.7748	MAJU
53	RAMSAI	WAY TUBA	0.7225	MAJU
54	BANDAR SARI	WAY TUBA	0.7403	MAJU
55	BUMI DANA	WAY TUBA	0.7611	MAJU
56	WAY PISANG	WAY TUBA	0.7427	MAJU
57	TANJUNG TIGA	REBANG TANGKAS	0.7656	MAJU
58	AIR RINGKIH	REBANG TANGKAS	0.7206	MAJU
59	SIMPANG TIGA	REBANG TANGKAS	0.7975	MAJU
60	BERINGIN JAYA	REBANG TANGKAS	0.7316	MAJU
61	MADANG JAYA	REBANG TANGKAS	0.7563	MAJU
62	BUMI JAYA	NEGARA BATIN	0.7467	MAJU
63	ADI JAYA	NEGARA BATIN	0,7467	MAJU
64	PURWA AGUNG	NEGARA BATIN	0.7927	MAJU
65	PURWA NEGARA	NEGARA BATIN	0.7556	MAJU
66	GISTING JAYA	NEGARA BATIN	0.7394	MAJU
67	SRI BASUKI	NEGERI BESAR	0.7616	MAJU
68	NEGERI JAYA	NEGERI BESAR	0.7268	MAJU
69	BIMA SAKTI	NEGERI BESAR	0.8149	MAJU
70	KILING-KILING	NEGERI BESAR	0.7123	MAJU
71	BUMI HARJO	BUAY BAHUGA	0.7524	MAJU

72	SUKA BUMI	BUAY BAHUGA	0.8041	MAJU
73	SUKA AGUNG	BUAY BAHUGA	0.8002	MAJU
74	PUNJUL AGUNG	BUAY BAHUGA	0.7762	MAJU
75	NUAR MAJU	BUAY BAHUGA	0.7125	MAJU
76	SRI TUNGGAL	BUAY BAHUGA	0.7871	MAJU
77	BUMI AGUNG	BUMI AGUNG	0.7775	MAJU
78	WONO HARJO	BUMI AGUNG	0.8094	MAJU
79	SUKA MAJU	BUMI AGUNG	0.7861	MAJU
80	PISANG INDAH	BUMI AGUNG	0.7621	MAJU
81	SRI NUMPI	BUMI AGUNG	0.7075	MAJU
82	SINAR GADING	KASUI	0.7383	MAJU
83	DATAR BANCONG	KASUI	0.7592	MAJU
84	KARANG LANTANG	KASUI	0.7944	MAJU
85	KASUI LAMA	KASUI	0.7929	MAJU
86	KAMPUNG BARU	KASUI	0.7349	MAJU
87	TANJUNG KURUNG	KASUI	0.7884	MAJU
88	TALANG MANGGA	KASUI	0.7802	MAJU
89	TANJUNG HARAPAN	KASUI	0.7514	MAJU
90	SUKA JADI	KASUI	0.776	MAJU
91	GELOMBANG PANJANG	KASUI	0.7371	MAJU
92	TANJUNG BULAN	KASUI	0.7437	MAJU
93	ARGO MULYO	BANJIT	0.7598	MAJU
94	BONGLAI	BANJIT	0.7424	MAJU
95	CAMPANG LAPAN	BANJIT	0.7197	MAJU
96	SUMBER BARU	BANJIT	0.7273	MAJU
97	BALI SADAR TENGAH	BANJIT	0.7627	MAJU
98	DONO MULYO	BANJIT	0.739	MAJU
99	BALI SADAR UTARA	BANJIT	0.7702	MAJU
100	BALI SADAR SELATAN	BANJIT	0.773	MAJU
101	RANTAU JAYA	BANJIT	0.7202	MAJU

102	BANDAR AGUNG	BANJIT	0.7441	MAJU
103	KEMU	BANJIT	0.7306	MAJU
104	NEKI	BANJIT	0.7568	MAJU
105	BANJAR SARI	BARADATU	0.7663	MAJU
106	GEDUNG REJO	BARADATU	0.7984	MAJU
107	TIUH BALAK I	BARADATU	0.8056	MAJU
108	TIUH BALAK	BARADATU	0.7086	MAJU
109	GEDUNG PAKUON	BARADATU	0.7903	MAJU
110	BUMI MERAPI	BARADATU	0.7256	MAJU
111	BUMI REJO	BARADATU	0.7317	MAJU
112	SUKOSARI	BARADATU	0.7705	MAJU
113	BANJAR AGUNG	BARADATU	0.7181	MAJU
114	CUGAH	BARADATU	0.7794	MAJU
115	BANJAR MASIN	BARADATU	0.7367	MAJU
116	BANJAR MULYA	BARADATU	0,7962	MAJU
117	BANJAR BARU	BARADATU	0.7781	MAJU
118	GUNUNG BARU	GUNUNG LABUHAN	0.713	MAJU
119	BANJAR SAKTI	GUNUNG LABUHAN	0.7198	MAJU
120	SUKA NEGERI	GUNUNG LABUHAN	0.7781	MAJU
121	BENGKULU	GUNUNG LABUHAN	0.7537	MAJU
122	BENGKULU REJO	GUNUNG LABUHAN	0.7586	MAJU
123	BANJAR RATU	GUNUNG LABUHAN	0.7759	MAJU
124	RAMBANG JAYA	UMPU SEMENGGUK	0.6741	BERKEMBANG
125	GISTANG	UMPU SEMENGGUK	0.6684	BERKEMBANG
126	NEGERI BATIN	UMPU SEMENGGUK	0.6776	BERKEMBANG
127	SRIWIJAYA	UMPU SEMENGGUK	0.6760	BERKEMBANG

128	BRATA YUDHA	UMPU SEMENGIK	0.7011	BERKEMBANG
129	GEDUNG BATIN	UMPU SEMENGIK	0.6905	BERKEMBANG
130	NEGERI BUMI PUTERA	UMPU SEMENGIK	0.7012	BERKEMBANG
131	PANCA NEGERI	UMPU SEMENGIK	0.7025	BERKEMBANG
132	GEDUNG RIANG	UMPU SEMENGIK	0.6657	BERKEMBANG
133	OJO LALI	UMPU SEMENGIK	0.6812	BERKEMBANG
134	LEMBASUNG	BLAMBANGAN UMPU	0.6922	BERKEMBANG
135	TANJUNG SARI	BLAMBANGAN UMPU	0.6402	BERKEMBANG
136	KARANG UMPU	BLAMBANGAN UMPU	0.7038	BERKEMBANG
137	UMPU KENCANA	BLAMBANGAN UMPU	0.6444	BERKEMBANG
138	TANJUNG RAJA SAKTI	BLAMBANGAN UMPU	0.6257	BERKEMBANG
139	TANJUNG RAJA GIHAM	BLAMBANGAN UMPU	0.6881	BERKEMBANG
140	KEDATON	KASUI	0.6437	BERKEMBANG
141	JUKUH KEMUNING	KASUI	0.6419	BERKEMBANG
142	TANGKAS	KASUI	0.7025	BERKEMBANG
143	TANJUNG KURUNG LAMA	KASUI	0.701	BERKEMBANG
144	BUKIT BATU	KASUI	0.6411	BERKEMBANG
145	RANTAU TEMIANG	BANJIT	0.6821	BERKEMBANG
146	JUKU BATU	BANJIT	0.6978	BERKEMBANG
147	MENANGA JAYA	BANJIT	0.694	BERKEMBANG
148	REBANG TINGGI	BANJIT	0.6959	BERKEMBANG
149	SIMPANG ASAM	BANJIT	0.6471	BERKEMBANG
150	SUMBER SARI	BANJIT	0.6848	BERKEMBANG
151	MENANGA SIAMANG	BANJIT	0.7049	BERKEMBANG
152	BANJAR SETIA	BARADATU	0.6819	BERKEMBANG
153	BANJAR NEGARA	BARADATU	0.6984	BERKEMBANG



154	MESIR ILIR	BAHUGA	0,7022	BERKEMBANG
155	BUMI AGUNG	BAHUGA	0.6094	BERKEMBANG
156	GIRI HARJO	BAHUGA	0.6465	BERKEMBANG
157	MEKAR JAYA	BAHUGA	0.6906	BERKEMBANG
158	KOTA DEWA	BAHUGA	0.6483	BERKEMBANG
159	MESIR UDIK	BAHUGA	0.6198	BERKEMBANG
160	DEWA AGUNG	BAHUGA	0.6857	BERKEMBANG
161	TANJUNG RATU	PAKUAN RATU	0.6957	BERKEMBANG
162	WAY TAWAR	PAKUAN RATU	0.7056	BERKEMBANG
163	GUNUNG WARAS	PAKUAN RATU	0.6331	BERKEMBANG
164	BUMI MULYA	PAKUAN RATU	0.7056	BERKEMBANG
165	KARANG AGUNG	PAKUAN RATU	0.6957	BERKEMBANG
166	GUNUNG CAHYA	PAKUAN RATU	0.6697	BERKEMBANG
167	KOTABUMI WAY KANAN	NEGERI AGUNG	0.6062	BERKEMBANG
168	GEDUNG MENENG	NEGERI AGUNG	0.7046	BERKEMBANG
169	WAY LIMAU	NEGERI AGUNG	0.6773	BERKEMBANG
170	BANDAR KASIH	NEGERI AGUNG	0.6483	BERKEMBANG
171	MULYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6406	BERKEMBANG
172	PENENGAHAN	NEGERI AGUNG	0.6641	BERKEMBANG
173	KARYA AGUNG	NEGERI AGUNG	0.6581	BERKEMBANG
174	SUNSANG	NEGERI AGUNG	0.6844	BERKEMBANG
175	KOTA BARU	NEGERI AGUNG	0.6463	BERKEMBANG
176	GEDUNG HARAPAN	NEGERI AGUNG	0.6295	BERKEMBANG
177	SAY UMPU	WAY TUBA	0.6856	BERKEMBANG
178	BERINGIN JAYA	WAY TUBA	0,6619	BERKEMBANG
179	SUMA MUKTI	WAY TUBA	0.6571	BERKEMBANG
180	BUKIT GEMURUH	WAY TUBA	0.6778	BERKEMBANG
181	WAY MENCAR	WAY TUBA	0.6795	BERKEMBANG
182	BUKIT HARAPAN	WAY TUBA	0.6738	BERKEMBANG

183	KARYA MAJU	REBANG TANGKAS	0.6948	BERKEMBANG
184	MULYA JAYA	REBANG TANGKAS	0.6214	BERKEMBANG
185	NEGERI MULYO	GUNUNG LABUHAN	0.6721	BERKEMBANG
186	NEGERI SUNGKAI	GUNUNG LABUHAN	0.7	BERKEMBANG
187	GUNUNG SARI	GUNUNG LABUHAN	0.6663	BERKEMBANG
188	KAYU BATU	GUNUNG LABUHAN	0.6624	BERKEMBANG
189	BENGKULU RAMAN	GUNUNG LABUHAN	0.6912	BERKEMBANG
190	BENGKULU JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6644	BERKEMBANG
191	TIUH BALAK II	GUNUNG LABUHAN	0.6459	BERKEMBANG
192	CURUP PATAH	GUNUNG LABUHAN	0.6721	BERKEMBANG
193	SUKARAME	GUNUNG LABUHAN	0.6725	BERKEMBANG
194	NEGERI UJAN MAS	GUNUNG LABUHAN	0.7025	BERKEMBANG
195	BENGKULU TENGAH	GUNUNG LABUHAN	0.6867	BERKEMBANG
196	GUNUNG PEKUWON	GUNUNG LABUHAN	0.6719	BERKEMBANG
197	LABUHAN JAYA	GUNUNG LABUHAN	0.6305	BERKEMBANG
198	SETIA NEGARA	NEGARA BATIN	0.6086	BERKEMBANG
199	SRI MULYO	NEGARA BATIN	0.6957	BERKEMBANG
200	SRI MENANTI	NEGARA BATIN	0.6389	BERKEMBANG
201	KARTA JAYA	NEGARA BATIN	0.6421	BERKEMBANG
202	MARGA JAYA	NEGARA BATIN	0,6214	BERKEMBANG
203	GEDUNG JAYA	NEGARA BATIN	0.6725	BERKEMBANG
204	SARI JAYA	NEGARA BATIN	0.6983	BERKEMBANG

205	NEGARA MULYA	NEGARA BATIN	0.6957	BERKEMBANG
206	KOTA JAWA	NEGARA BATIN	0.6833	BERKEMBANG
207	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	0.6647	BERKEMBANG
208	TEGAL MUKTI	NEGERI BESAR	0.7032	BERKEMBANG
209	TIUH BARU	NEGERI BESAR	0.6643	BERKEMBANG
210	NEGARA JAYA	NEGERI BESAR	0.6648	BERKEMBANG
211	TANJUNG MAS	NEGERI BESAR	0.6994	BERKEMBANG
212	NEGERI KASIH	NEGERI BESAR	0.7049	BERKEMBANG
213	KALIAWI	NEGERI BESAR	0.6805	BERKEMBANG
214	PAGAR IMAN	NEGERI BESAR	0.6046	BERKEMBANG
215	SUKADANA	BUAY BAHUGA	0.6671	BERKEMBANG
216	LEBUNG LAWE	BUAY BAHUGA	0.6913	BERKEMBANG
217	WAY AGUNG	BUAY BAHUGA	0.6913	BERKEMBANG
218	MULYO HARJO	BUMI AGUNG	0.6837	BERKEMBANG
219	KARANGAN	BUMI AGUNG	0.6617	BERKEMBANG
220	TANJUNG DALOM	BUMI AGUNG	0.6542	BERKEMBANG
221	BUMI SAY AGUNG	BUMI AGUNG	0.7037	BERKEMBANG

(Sumber Data : Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia).

#### 2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023

Renstra berisikan perencanaan yang bersifat makro, sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro pada setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, maka RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 2.

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bupati Way Kanan sebagai pemberi mandat. Pada dasarnya dokumen Perjanjian Kinerja berisi pernyataan/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.6  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATKAN KUALITAS SAKIP SKPD	NILAI SAKIP DINAS PMK	66,16 POIN
2.	- MENINGKATKAN KUALITAS KAMPUNG. - MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI. - MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL. - MENINGKATNYA KETAHANAN LINGKUNGAN.	INDEKS KATEGORI KAMPUNG  NILAI IKE  NILAI IKS  NILAI IKL	3,19  0,6333  0,8196  0,7285

	Program	Anggaran Rp.		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan/Refocusing	
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.822.773.034	Rp. 2.682.564.785	APBD
2.	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 44.342.000	Rp. 44.342.000	APBD
2.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.714.857.800	Rp. 1.978.457.800	APBD
3.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 1.770.629.500	Rp. 2.091.470.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.352.602.334</b>	<b>Rp. 6.796.834.585</b>	<b>APBD</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (*Progress Positif*), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (*Progress Negatif*), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya. Pengukuran kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui

tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Indikator Sasaran

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	KETERANGAN
1.	>100	Baik Sekali (BS)	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
2.	75 s/d <100	Baik (B)	
3.	55 s/d <75	Cukup (C)	
4.	< 55	Kurang (K)	

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan kinerja dimulai dengan melakukan analisis dan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian melakukan pengukuran realisasinya. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan akuntabilitas kinerja tahun ketiga dalam periode Renstra Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan/kegagalan yang dituangkan dalam uraian Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan menyajikan perbandingan tingkat capaian kinerja dengan target kinerja pada tahun 2023 dan membandingkan dengan capaian yang telah di capai di tahun sebelumnya serta membandingkan dengan Target akhir Renstra.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMK Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK.	Poin	66,16
Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Poin	3,19
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Poin	0,6333
Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Poin	0,8196
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Poin	0,7285



### 3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja di atas didukung oleh kinerja jajaran di tingkat bawah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung baik Eselon III, Eselon IV maupun Staf. Kinerja jajaran yang mendukung capaian kinerja Kepala Dinas PMK tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Meningkatnya Peran dan Lembaga Organisasi Masyarakat Kampung yang Aktif**

Guna meningkatkan peran lembaga organisasi masyarakat dan Kampung yang aktif, dicapai dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Indikatornya adalah antara lain:

- % BPK yang baik
- % PKK aktif
- % Posyandu aktif

Pada Tahun 2023, capaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Meningkatnya Peran dan Lembaga Organisasi Masyarakat Kampung  
Tahun 2023

INDIKATOR	2023
% BPK yang baik	1.423
% PKK yang baik	221
% Posyandu yang aktif	429
% BUMDes	221

Dari tabel di atas, bahwa % BPK yang baik sebanyak 1.423 dari 221 kampung, yang artinya secara keseluruhan BPK (100%) di Kabupaten Way Kanan sudah berperan baik. Sementara % PKK yang baik sebanyak 221 di Tahun 2023 yang artinya terdapat peningkatan peran serta PKK dalam pembangunan Kampung dan di Tahun 2023 % Posyandu yang aktif sebanyak 429 serta % BUMDesa Tahun 2023 sebanyak 221.

Pada Tahun 2023, dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti antara lain:

1. Sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kampung dalam hal pelaksanaan pembinaan pokja posyandu masih kurang.
2. Perlunya perhatian pemerintah secara berkelanjutan terhadap keberadaan lembaga terkait pelayanan dasar posyandu yang ada di Kampung.

3. Perlu peningkatan sumber daya manusia para pengurus Pokja Posyandu yang ada di Kampung.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Telah dilakukan pembinaan bagi kader-kader PKK berupa bimbingan teknis, Pelatihan, penyuluhan, pelatihan keterampilan, rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan
2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi ditingkat kabupaten terkait pembinaan pokjanal posyandu.

#### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Beberapa program dan kegiatan di laksanakan dan realisasinya di tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.126.000	1.114.600	99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.175.000	1.133.700	96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.296.000	1.268.700	98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.688.000	1.657.800	98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.977.761.700	1.916.739.612	97
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.800.000	115.800.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.586.000	1.498.300	94

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.326.000	1.260.100	95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.066.000	2.886.000	94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.393.385	27.392.460	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.582.700	3.413.900	95
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.220.000	6.720.000	82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.700.000	150.074.586	80
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	18.600.000	-	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.161.000	25.900.000	95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.740.000	114.435.504	90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.143.000	54.143.000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.200.000	9.200.000	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Pemeliharaan\Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangun Lainnya	65.00.000	65.000.000	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			
Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	44.342.000	41615400	94
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	275.709.600	262.295.800	95
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	74.540.300	62.982.800	84
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122.348.900	105.964.825	87
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	86.805.000	77.401.200	89
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	952.892.700	928.610.890	97
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	131.243.400	115.678.100	88
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	162.500.000	126.646.900	78
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	79.800.000	78.758.700	99
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	92.617.900	-	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	275.977.000	257.5465.00	93
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	119.652.900	118.932.900	99
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1.106.200.000	1.106.197.000	100

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	589.640.100	585.265.600	99

➤ **Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan**

Untuk meningkatkan usaha ekonomi perdesaan, maka dilakukan dengan pengembangan BUMDes. Sehingga indikator yang digunakan adalah Jumlah BUMDes yang terbentuk dan BUMDes yang baik. Pada tahun 2023, Capaian kinerja realisasi Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk dan persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik Tahun 2023 meningkat sebanyak 175 BUMDesa meningkat dari target ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 79,18%.

**Permasalahan:**

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi yang dapat membangkitkan Perekonomian Masyarakat terdapat masalah-masalah yang dihadapi diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan aktif melaksanakan aktivitas
2. perekonomian, akan tetapi unit usaha yang dibentuk belum berdasarkan potensi
3. unggulan Desa dan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Masih banyak usaha BUMDesa yang bergerak dibidang simpan pinjam
5. Pemahaman pengurus Lembaga Keuangan Mikro yang baru belum memadai
6. Ada beberapa kelompok SPP yang tunggakannya bermasalah

**Solusi:**

Dari permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan solusi yang ditempuh sebagai berikut:

1. BUMDes yang terbentuk diarahkan untuk membentuk unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi lokal wilayah dan Pengurus BUMDes ditingkatkan

kapasitasnya melalui Pelatihan dan bimbingan.

2. Penguatan kapasitas Pengurus UPK yang baru melalui Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi perkembangannya yang melibatkan stakeholder terkait.

➤ **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung.**

Guna Meningkatkan Manajemen dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dilakukan dengan meningkatkan antara lain jumlah kampung dengan adminitrasi yang baik. Pada Tahun 2023 persentase administrasi Kampung yang tata kelola administrasinya sesuai dengan ketentuan dari 221 Kampung, terdapat 115 Kampung yang tata kelola administrasinya sesuai dengan Ketentuan. Sedangkan Kampung yang tertib pengelolaan keuangannya dari 221 Kampung, terdapat 160 Kampung yang tertib pengelolaan keuangannya.

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia Aparatur masih rendah
2. Pemeliharaan hasil pembangunan secara swadaya masih belum memadai
3. Terdapat 2 (dua) versi regulasi yang mengatur klasifikasi desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

**Solusi:**

Solusi-solusi yang dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan langsung pada Desa.

2. Pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh Desa agar instrumen desa mandiri bisa tercapai.
3. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan swadaya dan kegotongroyongan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya dalam Tahun 2023 dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran berdasarkan dari hasil capaian kinerja sasaran kesatu dengan predikat berhasil , sasaran kedua dengan predikat sangat berhasil dan sasaran ketiga dengan predikat sangat berhasil, sasaran ke empat dengan predikat sangat berhasil dan sasaran ke lima dengan predikat sangat berhasil sebagaimana yang telah diuraikan bab dimuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mendapatkan predikat sangat berhasil.

Namun demikian dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dan telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahun berikutnya.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN  
 NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022  
 TANGGAL : 16 November 2022  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN  
 TAHUN 2021-2026**

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.  
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

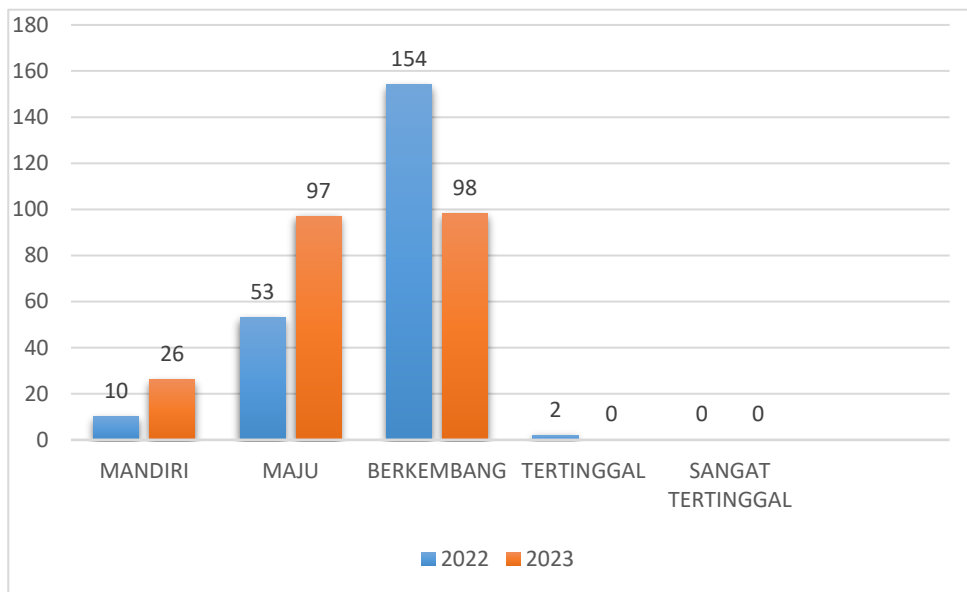
NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

**KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**



**IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19751101 199503 1 001

**DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)  
KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022/2023**



KLASIFIKASI IDM	2022		2023	
MANDIRI	10	4,57%	26	11,76%
MAJU	53	24,20%	97	43,89%
BERKEMBANG	154	70,32%	98	44,34%
TERTINGGAL	2	0,91%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%

**SUMBER DATA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN WAY KANAN.**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan**

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>					<b>1,971,817,100</b>				
Program Kerja PKK	Terselenggaranya program kerja PKK Kabupaten Way Kanan	Dokumen	1	1. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	589,640,100		
					<b>Output :</b> Terselenggaranya program kerja PKK Kabupaten Way Kanan				
					<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1		
Pelatihan Kader Posyandu	Meningkatnya pengetahuan kader posyandu	Dokumen	1	2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	275,977,000		
					<b>Output :</b> Meningkatnya pengetahuan kader posyandu				
					<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		
Kegiatan TMMD dan BBGRM	Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam bergotong royong	Dokumen	1	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	1,106,200,000		
					<b>Output :</b> Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam bergotong royong				
					<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1		
<b>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>					<b>86,805,000</b>				
Pelatihan BUM Desa	Meningkatnya pengetahuan pengurus Bumdes dalam pengelolaan Bumdes	Dokumen	50	1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	86,805,000		
					<b>Output :</b> Meningkatnya pengetahuan pengurus Bumdes dalam pengelolaan Bumdes				
					<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	50		

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<b>4. Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>				<b>44,342,000</b>
Pelaksanaan Kerjasama antar desa	Terlaksananya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Dokumen	1		1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	<b>Input :</b>			
						- Dana	Rupiah	44,342,000	
						- SDM			
						<b>Output :</b>			
						Terlaksananya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota			
						<b>Outcome :</b>			
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		1
					<b>6. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>				<b>1,391,102,300</b>
Pelatihan Aparatur Kampung	Meningkatnya pengetahuan aparatur kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung	Kampung	221		1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	<b>Input :</b>			
						- Dana	Rupiah	275,709,600	
						- SDM			
						<b>Output :</b>			
						Meningkatnya pengetahuan aparatur kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung			
						<b>Outcome :</b>			
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		1
Pemilihan Kepala Kampung secara serentak	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2023	Kampung	118		2. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	<b>Input :</b>			
						- Dana	Rupiah	952,892,700	
						- SDM			
						<b>Output :</b>			
						Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2023			
						<b>Outcome :</b>			
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dokumen		1
Terlatihnya Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset Kampung	Aparatur Kampung	Kampung	221		2. Fasilitasi pengelolaan aset desa	<b>Input :</b>			
						- Dana	Rupiah	162,500,000	
						- SDM			
						<b>Output :</b>			
						Terlatihnya aparatur kampung dalam pengelolaan aset desa			
						<b>Outcome :</b>			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		1
					<b>7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>				<b>119,652,900</b>
Peningkatan Pemanfaatan TTG sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Meningkatkan Pengetahuan dan Kelompok Binaan Pengembangan TTG	Laporan	1		1. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	<b>Input :</b>			
						- Dana	Rupiah	119,652,900	
						- SDM			
						<b>Output :</b>			
						Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap TTG			
						<b>Outcome :</b>			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		1

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					<b>8. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>196,889,200</b>	
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung	Kampung	221		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<b>Input :</b>			
						- Dana - SDM	Rupiah	122,348,900	
						<b>Output :</b> Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kampung	Dokumen	1	
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung	Memberikan Pengetahuan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung (SISKEUDes)	Kampung	221		2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	<b>Input :</b>			
						- Dana - SDM	Rupiah	74,540,300	
						<b>Output :</b> Terlaksananya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kampung			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	
					<b>9. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>303,661,300</b>	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terlaksananya dan Terpilihnya Kampung Berprestasi	Kecamatan	14		1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<b>Input :</b>			
						- Dana - SDM	Rupiah	92,617,900	
						<b>Output :</b> Terlaksananya kampung berprestasi			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung	Meningkatnya Kualitas Ketua dan Anggota BPK	Kampung	221		2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	<b>Input :</b>			
						- Dana - SDM	Rupiah	79,800,000	
						<b>Output :</b> Terlaksananya pembinaan anggota BPD dalam peningkatan kapasitas			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Profil Kampung	Aparatur Kampung	Kampung	221		3. Fasilitasi penyusunan profil desa	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	131,243,400	
						<b>Output :</b> Terlaksananya penyusunan profil desa			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	
<b>10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>2,674,367,785</b>	
Peningkatan Kapasitas Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar	Bulan	12		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah	127,740,000	
						<b>Output :</b> Tersedianya jaringan internet, listrik dan air			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Orang	22		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah Orang	1,977,761,700 22	
						<b>Output :</b> Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	
						<b>Outcome :</b> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	
Meningkatnya Kesejahteraan Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Dinas PMK	Bulan	12		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Input :</b> - Dana - SDM	Rupiah Orang	115,800,000 12	
						<b>Output :</b> Terlaksananya administrasi keuangan			
						<b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Kebersihan, kerapian dan keamanan serta ketertiban kantor	- Honorarium Petugas Jaga malam, Sopir Jabatan dan Petugas Kebersihan	Bulan	12	4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<b>Input :</b>				
	- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih				- Dana	Rupiah	54,143,000		
					- SDM				
					<b>Output :</b>				
					Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam, driver eselon II dan alat-alat kebersihan kantor				
					<b>Outcome :</b>				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	
terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja dengan baik	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kerja :	Bulan	12	5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<b>Input :</b>				
	- Komputer PC				- Dana	Rupiah	9,200,000		
	- Laptop				- SDM				
	- Printer				<b>Output :</b>				
	- AC				Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja (komputer PC, laptop, printer dan AC)				
					<b>Outcome :</b>				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		16	
Alat Tulis Kantor	Terlaksananya belanja ATK selama 1 tahun	Bulan	12	6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Input :</b>				
					- Dana	Rupiah	27,393,385		
					- SDM				
					<b>Output :</b>				
					Tersedianya alat tulis kantor				
					<b>Outcome :</b>				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	
Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan foto copy selama 1 tahun	paket	1	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Input :</b>				
					- Dana	Rupiah	3,582,700		
					- SDM				
					<b>Output :</b>				
					Tersedianya barang cetak dan penggandaan				
					<b>Outcome :</b>				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	
Berfungsinya Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Alat Alat Listrik dan elektronik	Bulan	12	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Input :</b>				
					- Dana	Rupiah	3,066,000		
					- SDM				
					<b>Output :</b>				
					Tersedianya komponen alat-alat listrik/penerangan gedung kantor				
					<b>Outcome :</b>				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menyelenggarakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Laporan	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rupiah	186,700,000	1
Berfungsi kendaraan dinas dengan baik	Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan pembayaran pajak mobil dinas	Bulan	12	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan <b>Outcome :</b> Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rupiah	50,000,000	2
Terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan baik	pemeliharaan bangunan gedung kantor	Unit	2	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Terpeliharanya bangunan gedung kantor <b>Outcome :</b> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rupiah	65,000,000	2
Makanan dan Minuman Rapat Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	Laporan	1	12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya makan minum Tamu <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rupiah	8,220,000	1
Pakaian PDH ASN	Terwujudnya Disiplin pegawai	Paket	1	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Terwujudnya disiplin Pegawai <b>Outcome :</b> Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rupiah	18,600,000	1
Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	Unit	2	14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja <b>Outcome :</b> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rupiah	27,161,000	2
<b>12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>8,197,000</b>	
Tersedianya LAKIP SKPD	LAKIP SKPD	Dokumen	1	1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya laporan lakip skpd <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupiah	1,296,000	1





Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rupiah	1,586,000	1	
Tersusunnya Lakip SKPD	Dokumen LAKIP	Laporan	1	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya laporan lakip <b>Outcome :</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rupiah	1,688,000	1	
Tersedianya Dokumen RENJA dan Evaluasi RENJA	Tersusunnya RENJA dan Evaluasi RENJA	Dokumen	1	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya renstra, renja dan evaluasi renja <b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rupiah	1,126,000	1	
Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	Dokumen	1	6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	<b>Input :</b> - Dana - SDM <b>Output :</b> Tersedianya RKA dan DPA SKPD <b>Outcome :</b> Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rupiah	1,175,000	1	
<b>Jumlah Total</b>								<b>6,796,834,585</b>	

Blambangan Umpu, Januari 2023  
 KEPALA DINAS  
 PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
 KABUPATEN WAY KANAN,  
  
 IXUAN ALMADI, S.Sos., MM  
 Kepala Dinas Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19751101 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
Alamat : Jl. Camat Mas enggung, Komplek Perkantoran Km. 02 Telp./Fax (0723)461027  
**BLAMBANGAN UMPU** Kode pos 34564

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten WayKanan

***selanjutnya disebut pihak Kesatu***

Nama : **Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH., MM**  
Jabatan : **BUPATI WAY KANAN**

***selaku Atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak Kedua***

**Pihak Kesatu** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntansi Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blambangan Umpu, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Bupati Way Kanan



**Hi. RADEN ADIPATI SURYA, S.H., MM**  
(Atasan Langsung)

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas PMK



**IXUAN AHMADI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751101 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**KAMPUNGKABUPATEN WAY KANAN**

NAMA PEJABAT : IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
 JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG  
 ESELON : II.b  
 UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	POIN	3,19
2.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	POIN	0,6333
3.	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	POIN	0,8196
4.	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	POIN	0,7285
5.	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK.	Evaluasi Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	POIN	66,16

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.682.564.785	APBD
2.	PENINGKATAN KERJASAMAANTAR DESA	44.342.000	APBD
3.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.978.457.800	APBD
4.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.091.470.000	APBD

**Rp. 6.796.834.585**

**(Terbilang : Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).**

Blambangan Umpu, Januari 2023


  
 Bupati Way Kanan  
ADIAN ADIATI SURYA, S.H., MM  
 (Asisten Langsung)


  
 Kepala Dinas PMK  
IXUAN AHMADI, S.Sos  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19751101 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN**

NAMA PEJABAT : IXUAN AHMADI, S.Sos., MM  
 JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG  
 ESELON : II.b  
 UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KET
			SATUAN	TAHUN 2023	
1	Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan	LHKPN – SPT Tahun 2022	%	100	
2	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (LHP)	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APH/APIP	%	100	
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah	Capaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah Terpadu	Kategori	HIJAU	
4	Peningkatan Displin ASN	Penjatuhan Hukuman Displin pada jajaran di bawahnya sesuai PP 94 Tahun 2021	%	100	
5	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Capaian Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	
6	Penurunan Angka Stunting	Angka Stunting	%	16	
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,40	
8	Kabupaten Layak Anak	KLA	Kategori	Nindya	
9	Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dan SPI	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dan SPI (MCP-KPK)	%	100	

Blambangan Umpu, Januari 2023

  
 Bupati Way Kanan  
  
**H. RADEN ANWAR ATI SURYA, S.H., MM**  
 (Pimpinan Langsung)

  
 Kepala Dinas PMK  
  
**IXUAN AHMADI, S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19751101 199503 1 001









SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							10														
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11		
						- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Blambangan Umpu	8,220,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka/berkumpul	
			2	2		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat yang mendapat biaya pemeliharaan	2 Bulan	Blambangan Umpu	50,000,000.00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			√			√									
			2			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD dan Dokumen Evaluasi Renja SKPD	2 Dokumen	Blambangan Umpu	1,126,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					√										
					2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Blambangan Umpu	1,175,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan										√					
					1	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Blambangan Umpu	1,296,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan												√			
					1	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen lakip SKPD	1 Dokumen	Blambangan Umpu	1,688,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan												√			
		22	22	22	22	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan	Blambangan Umpu	2,167,969,949.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		11	11	11	11	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Blambangan Umpu	115,800,000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Blambangan Umpu	1,586,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan												√			
				2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Blambangan Umpu	1,326,000.00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan									√						



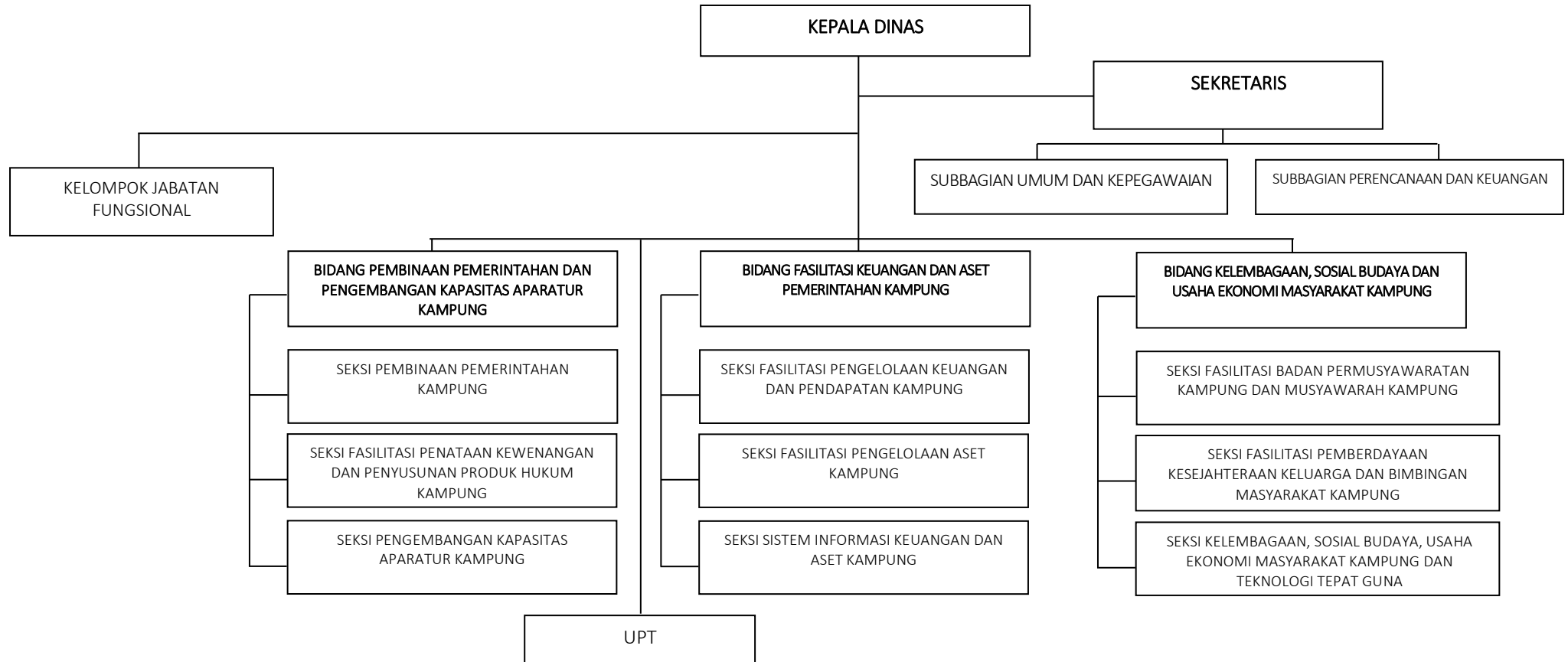
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4																			
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11



KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
KABUPATEN WAY KANAN

**IXUAN AHMADI, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751101 199503 1 001

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN



*(Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018)*